

JK Analogikan NU Seperti McDonald's, Muhammadiyah Holding Company ...

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menganalogikan Nahdlatul Ulama (NU) seperti franchise tempat makan McDonald's. JK mengatakan hal ini dalam acara Seminar Nasional Halaqah Satu Abad NU bertajuk "Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin" di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Awalnya, JK mengatakan orang-orang NU memiliki banyak pesantren. Namun, pesantren itu bukan milik NU tetapi milik para kiai NU.

"Ribuan pesantren di Indonesia ini yang sebagian besar dimiliki oleh NU, tapi bukan milik NU, (melainkan) milik orang NU. Ada bedanya," kata JK di lokasi.

JK melanjutkan, sistem yang ada di NU berbeda dengan Muhammadiyah. Sebab, ia berpendapat, Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit dan sekolah yang berada

langsung di bawah kepemilikan Muhammadiyah.

Ya kemudian menganalogikan NU seperti tempat makan franchise McDonald's. Sedangkan, Muhammadiyah seperti holding company.

"Jadi saya sering minta maaf saya katakan, kalau NU itu kaya franchise, McDonald's, semua itu McDonald's itu adalah yang punya beda-beda. Kalau Muhammadiyah holding company, dari atas sampai ke bawah dia punya," ucapnya.

Kendati demikian, JK menilai sistem keduanya sama-sama hebat. Menurut JK, sistem yang dimiliki NU sudah terkontrol dan teruji.

"Tapi dua-duanya hebat, saya bilang jangan robah. Ini dua-duanya hebat. Bayangkan hebatnya McDonald, pemiliknya berbeda-beda tapi mereka punya sistem yang dikontrol, kepemilikannya nomor dua, tapi sistemnya yang terkontrol dan teruji," kata JK. ● mei

2 Polhukam

FOTO:ANT



RAKER KOMISI VI DP DENGAN MENTERI BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12). Rapat tersebut membahas penyampaian rencana Initial Public Offering (IPO) dan Right Issue BUMN di tahun 2021-2022.

Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul BackDate

Saksi mengatakan, pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur, oleh PPSJ untuk program pembangunan Rumah DP Rp0 disebut terburu-buru.

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ), Denan Kaligis mengatakan, penandatanganan berkas kajian investasi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur, dilakukan dengan tanggal mundur atau backdate.

Hal ini ia sampaikan Denan saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/12).

Denan menjadi saksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama PPSJ, Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertiindo, Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara, Anja Runtuwene, pemilik PT Adonara, Rudi Hartono dan PT Adonara.

"Saudara tahu tidak kajian investasi itu backdate?" tanya jaksa dalam persidangan.

"Tahu, dan memang sering ada dokumen backdate," jawab Denan.

Dalam kesaksiannya, Denan juga menyampaikan backdate sering dilakukan pada beberapa dokumen di PPSJ. Ia menyebut hal itu kerap dilakukan untuk merapikan berkas administratif.

"Hanya dilakukan untuk kebutuhan administrasi saya tidak menyangka kalau ini digunakan untuk tindakan korupsi," katanya.

Denan mengatakan, sebagai Direktur Pengadaan PPSJ saat itu mestinya ia terlibat aktif terkait pengadaan lahan Munjul. Tapi, ia tidak banyak mengurus proyek itu karena Yoory langsung berkoordinasi dengan bawahannya, yaitu Yadi Robby dan Indra Arharrys sebagai Senior Manager PPSJ.

Terburu-buru

Denan menjelaskan bahwa pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur, oleh PPSJ untuk program pembangunan Rumah DP Rp0 disebut terburu-buru.

Mulanya jaksa bertanya mengenai siapa Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk oleh PPSJ untuk melakukan penilaian lahan Munjul. Namun Denan mengaku tidak mengetahui siapa konsultan yang ditunjuk, sebab hal itu diurus oleh bawahannya yaitu Senior Manager PPSJ, Indra Arharrys.

"Lalu saudara tahu dari Indra siapa KJPP yang ditunjuk?"

tanya jaksa.

"Saya tidak tahu. Karena Munjul ini kasusnya agak lain, karena prosesnya sangat cepat, buru-buru," jawab Denan.

Lebih lanjut, Denan mengaku belum sempat melakukan survei ke lahan Munjul.

"Saya sendiri belum cek ke lokasi. Biasanya saya melakukan pengecekan. Ini saya belum mengecek tapi pembayarannya sudah dilakukan," tuturnya.

Jaksa lantas menecer Denan terkait dengan anggapan bahwa proses pengadaan lahan Munjul itu sangat cepat.

"Cepat itu menurut saudara berapa lama?" tanya jaksa.

"Itu cepat sekali Pak, hanya sekitar satu bulan," jawab Denan.

Dalam perkara ini jaksa menduga kerja sama antara para terdakwa telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp 152 miliar. Jaksa menduga Yoory Corneles memerintahkan pembayaran lahan Munjul kepada PT Adonara Propertiindo untuk proyek pembangunan Rumah DP Rp 0. Padahal, lahan itu tidak bisa dibangun karena lokasinya berada di zona hijau.

Dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa lahan Munjul belum sepenuhnya milik PT Adonara, namun masih dikuasai oleh Kongregasi Biarawati Carolus Boromeus (CB). Saksi dari Kongregasi CB menyebut PT Adonara melalui

Anja Runtuwene baru membayar uang muka senilai Rp 10 miliar dari total kesepakatan Rp 100 miliar. Maka, uang itu

kemudian dikembalikan oleh Kongregasi CB, dan persetujuan jual beli lahan dibatalkan. ● han

Geger Kontes Waria Berkedok Acara Khatam Alquran, Kok Bisa?

POLEWALI MANDAR (IM) - Kontes waria yang digelar di Kelurahan Pappang, Kecamatan Capalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dibubarkan petugas pada Selasa (30/11) malam.

Kegiatan itu dibubarkan karena menyalahi izin kegiatannya. Semula, panitia acara meminta izin untuk menggelar khatam Alquran secara sederhana. Namun ternyata setelah diselidiki acara tersebut merupakan kontes waria. "Awalnya memang yang bersangkutan memiliki rencana menggelar akikahan atau khatam Alquran," kata Lurah Pappang, Nabil Widjan, Kamis (2/12).

Dalam acara itu, sekitar puluhan waria se-Polewali Mandar berkumpul. Mereka melakukan kontes layaknya model yang tampil di depan umum.

"Kegiatan ini ramai dihadiri

para waria. Setelah acara berlangsung ternyata banyak waria memakai gaun," ujarnya.

Saat acara berlangsung, petugas gabungan dari polsek dan pihak Kelurahan Pappang pun membubarkan acara tersebut. Acara ini dinilai telah menyalahi izin. Kegiatan itu juga dianggap melanggar protokol kesehatan (prokes). Selain itu, kegiatan tersebut dinilai melanggar norma adat.

"Tidak ada masalah berarti (dalam pembubaran-red). Kegiatan tersebut bisa kami bubarkan," katanya.

Lurah Pappang, Nabil Widjan, mengaku kesal dengan kegiatan tersebut. Terlebih lagi pihak panitia meminta izin ingin menggelar khatam Alquran. Aparat Polsek Capalagian juga telah meminta keterangan dari penyelenggara kegiatan ini. ● mei

Ketua DPD RI Minta CPNS dan Oknum BKN yang Berlaku Curang dalam SKD Ditindak

BOGOR (IM) - Sebanyak 252 peserta berbuat curang saat mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2021. Mereka bekerja sama dengan oknum Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan aksi curang tersebut tidak bisa ditolerir lagi. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat harus diberi tindakan tegas.

"Kita sangat menyesalkan masih adanya kecurangan dalam rekrutmen. Hal itu sangat tidak etis. Kita berharap para CPNS yang curang didiskualifikasi. Tidak patut mereka menjadi abdi negara. Oknum BKN yang terbukti terlibat juga harus dipecat sebagai PNS," tegas LaNyalla, di sela-sela kunjungan kerja ke Bogor, Kamis (2/12).

Sanksi berat dan tindakan tegas, lanjut LaNyalla, agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Dengan cara itu, diharapkan ke depan para peserta CPNS dan pegawai tidak berani lagi untuk 'main mata'.

"Mereka ini merusak sistem rekrutmen yang sudah diciptakan sesuai standar yang diperlukan. Karena idealnya sistem rekrutmen yang digunakan adalah mampu menjangkau CPNS yang berkualitas sesuai dengan standar pass-

ing grade yang ditetapkan," jelasnya.

"Jika ada kongkalikong seperti ini, takutnya CPNS yang diterima jauh dari standar yang dibutuhkan. Bisa jadi tidak sesuai kecakapan maupun kompetensinya sehingga ke depan menjadi kendala dalam melayani masyarakat," paparnya.

Lebih penting lagi, menurut LaNyalla, hal itu berkaitan dengan moral calon abdi negara. Sungguh tak elok, calon pegawai yang seharusnya menjadi orang-orang pilihan berlaku tidak jujur.

"Kita imbu pada para peserta seleksi CPNS agar berlaku jujur. Menurut saya, segala pekerjaan yang dimulai dari ketidakjujuran bukan hanya tidak berkah tetapi juga akan menuntun konsekuensi berat dan hilang kepercayaan orang terhadap kita," ungkap Senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla berharap kecurangan yang terjadi dievaluasi, sehingga ada perbaikan baik terhadap sistem maupun SDM-nya.

"Kenapa masih ada celah kecurangan? Itu yang harus diperbaiki ke depan. Makanya perlu evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan rekrutmen, termasuk dari segi teknologinya. BKN juga harus selektif dengan memilih petugas-petugas yang kredibel dan berdedikasi," ucapnya.

Kecurangan dalam perekrutan CPNS itu diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjoe Kumolo. Dijelaskan oleh BKN kecurangan dalam seleksi CPNS 2021 bermotuskan remote access alias komputer yang digunakan peserta bisa diakses oleh orang lain dari jarak jauh.

Di mana temuan kecurangan CPNS 2021 saat SKD terjadi di sejumlah titik lokasi seleksi. Hal itu terungkap setelah BKN dan Badan Siber Sandi Negara melakukan pemeriksaan digital forensik dengan cara menelusuri pola peserta di server CAT BKN. ● han



FOTO:ANT

ZIARAH DI MAKAM PAHLAWAN

Kepala Staf Koarmada II (Kaskoarmada II) Laksma TNI Rachmad Jayadi (kanan) meletakkan karangan bunga saat berziarah di Taman Makam Pahlawan 10 Nopember, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/12). Ziarah ke makam pahlawan tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Armada.

Fraksi Nasdem akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan kepada TNI

JAKARTA (IM) - Fraksi Partai Nasdem akan menegur anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut terkait permintaan bantuan pengamanan atau ajudan ke Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Yang pasti saya akan menegur karena itu tanpa koordinasi daripada fraksi," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Ali, Kamis (2/12).

Ali mengatakan, meski secara aturan sah, namun permintaan tersebut tidak etis karena pengawalan pimpinan DPR dari kepolisian, bukan TNI.

"Kalau anggota DPR meminta pengamanan pegawai tanpa apalgi institusi TNI kayaknya enggak pas, khusus dari Nasdem saya tidak setuju dengan itu," kata Ali.

Ali pun menilai tidak ada alasan mendesak yang membuat Hillary perlu meminta ajudan dari TNI. Menurut dia, Hillary semestinya sudah mengetahui risiko yang akan dihadapi sebagai politisi. Oleh karena itu, ia meminta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dukung Abdurachman untuk tidak merespons permintaan Hillary.

"Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu karena menurut saya tidak patut karena alasan

yang disampaikan seperti disampaikan tadi," ujar Ali.

Sebelumnya, Hillary mengaku mengirimkan surat kepada KSAD untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Anggota DPR termuda itu menjelaskan, ia memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat.

Ia menuturkan, pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman dari rasa khawatir karena mesti mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat.

"Kalau ditanya kenapa, jujur saya harus mengakui cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan, berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak terbekal," ujar Hillary.

Adapun permintaan ajudan oleh Hillary tersebut diketahui setelah beredarnya surat telegram yang ditandatangani Asisten Personil KSAD Mayjen TNI Wawan Ruswandi. Surat telegram itu berisi instruksi pengiriman personel bintang TNI untuk mengikuti seleksi dalam rangka pengutusan sebagai

ajudan Hillary. ● han

KSAD Bakal Rekrut Santri untuk Jadi Anggota TNI AD

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dukung Abdurachman mengatakan akan membuka rekrutmen khusus untuk para santri. Perekrutan itu dibuka untuk jenjang Tamtama hingga Perwira TNI AD.

"Pada kesempatan kali ini juga, saya akan merekrut prajurit baik tamtama maupun perwira ini khusus para santri. Dari pesantren-pesantren termasuk dari lintas agama, khususnya dari muslim, ada khusus lagi tafsir Alquran," kata Dukung saat meninjau pengamanan Aksi Reuni 212 di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/12).

Jenderal Dukung mengungkapkan alasannya. Itu karena para santri yang dididik

di pesantren memiliki akhlak yang baik.

"Saya merekrut ini, karena saya yakin kalau dari pesantren, yang sudah dididik agama sudah pasti terjaga masalah akhlak," tuturnya.

Jenderal bintang empat tersebut juga mengatakan, akhlak itu bisa terimplementasi, TNI tidak merugikan rakyat. Dia berharap dari para santri, ketika nantinya telah masuk ke dalam dunia militer maka dapat lebih tenang ketika menghadapi situasi apapun.

"Para santri ini juga nanti akan jadi prajurit yang berakhlak, prajurit yang di lapangan nantinya menghadapi situasi apapun mereka lebih tertata di dalam komunikasi khususnya di dalam bertingkah laku," ujarnya. ● han

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, partainya membuka diri untuk Menteri BUMN Erick Thohir setelah menjadi anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU).

Jazilul mengatakan, sah-sah saja apabila ada yang mengaitkan langkah Erick bergabung ke Banser sebagai upaya menuju kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau pandangan orang bahwa Pak Erick Thohir ini masuk Banser tujuannya untuk politik, ya itu sah-sah saja pandangan orang begitu. Tetapi kalau Pak Erick Thohir masuk politik, cocok itu dengan PKB," kata Jazilul, melalui siaran pers, Kamis (2/12).

"Sudah pakai baju loreng (Banser), benteng ulama. Ada jalurnya. Jalur politiknya ya PKB kalau sudah Ansor, biasanya begitu," katanya.

Jazilul menuturkan, status anggota kehormatan Banser akan memberikan keuntungan

bagi Erick karena akan memiliki jaringan di seluruh Indonesia.

"Intinya adalah beliau itu sebenarnya visinya sama dengan visi keislaman Ansor. Cara pandang terhadap komitmen kebangsaan beliau sama dengan cara pandang Ansor dan Banser," katanya.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, kader Banser dan Ansor di seluruh Indonesia kini menunggu kiprah yang akan dilakukan mantan bos Inter Milan itu bagi Banser, ulama, dan NKRI. Menurut Jazilul, anak-anak muda Ansor perlu penguatan keterampilan, keahlian, dan juga kompetensi.

"Nah sekarang kita tunggu kiprahnya Pak Erick Thohir setelah pakai baju loreng dan baret hitam (seragam Banser)," kata Jazilul, melalui siaran pers, Kamis (2/12).

"Saya berharap Pak Erick dengan kemampuannya akan memberikan masukan kepada Banser-Ansor, terutama di bidang teknologi digital dan informasi, termasuk kewirausa-

haan karena beliau seorang pengusaha," tuturnya.

Diberitakan, Erick dilantik menjadi anggota kehormatan Banser NU sesuai mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar.

"Ini suatu penghormatan luar biasa yang tidak terhingga buat saya karena bisa menjadi keluarga besar Banser," kata Erick, dilansir dari Antara, Minggu (28/11).

Ia menambahkan, selama ini Banser telah berkomitmen jihad untuk NKRI. Organisasi itu juga dinilai menjunjung tinggi keberagaman dan perbedaan yang menjadi kekuatan bagi Indonesia. Erick mengaku sering berdiskusi dengan keluarga besar Banser dalam upaya meningkatkan dan menjaga NKRI ke depan. Menurutnya, upaya menjaga dan memajukan Indonesia merupakan tujuan yang mulia.

"Insya Allah, saya akan mewakafkan pikiran, energi, dan kemampuan saya untuk kebenaran serta untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya. ● han

PENGUMUMAN
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT QUANTUM PARKING SOLUTIONS ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan dan mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Jalan Biak No. 48 C, lantai 3, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah penunjukkan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masa jabatan 2021 – 2026.

Catatan:
1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengirimkan panggilan tertulis melalui surat tercatat kepada masing-masing pemegang saham karena pemanggilan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada Kuasa Direksi untuk hadir dan memberikan suara dalam pemungutan suara.
3. Pemegang saham atau penerima kuasanya wajib hadir di tempat yang telah disebutkan di atas 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 3 Desember 2021
PT Quantum Parking Solutions
Direksi

PENGUMUMAN
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PARKING INTEGRATED SOLUTIONS ("PERSEROAN")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan dan mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
Waktu : 11:00 WIB
Tempat : Jalan Biak No. 48 C, lantai 3, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
1. Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masa jabatan 2021 – 2026.
2. Rencana pengalihan perijinan pengelolaan parkir kepada perusahaan pengelola parkir yang ditunjuk Perseroan.

Catatan:
1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengirimkan panggilan tertulis melalui surat tercatat kepada masing-masing pemegang saham karena pemanggilan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada Kuasa Direksi untuk hadir dan memberikan suara dalam pemungutan suara.
3. Pemegang saham atau penerima kuasanya wajib hadir di tempat yang telah disebutkan di atas 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 3 Desember 2021
PT Parking Integrated Solutions
Direksi